



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

### ABSTRAK

Oleh

**Abdillah Khairi**  
**Nim 11375103840**

*Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai wakil masyarakat, sebagai mitra pemerintahan, dan sebagai pengawas. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu suatu analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan fenomena yang didapat, serta menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pulau Tengah yaitu menunjukkan bahwa BPD Pulau Tengah belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan melalui anggota BPD, anggota LPM, dan responden masyarakat, dimana seluruh masyarakat yang menjadi responden penelitian tersebut menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Pulau Tengah tidak berjalan, dikarenakan bahwa BPD mendapatkan tekanan dari Pemerintah Desa yang merasa dirinya lebih berkuasa dalam sistem pemerintahan, sehingga BPD tidak bisa menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.*

**Kata Kunci:** Peranan, BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan